

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Usahatani Padi Sawah

Terdapat empat unsur pokok yang selalu ada dalam usahatani, yaitu unsur tanah (yang mewakili alam), unsur modal yang beraneka ragam jenisnya, unsur tenaga kerja yang tertumpu pada anggota keluarga petani, dan unsur pengelolaan atau manajemen yang perannya dibawa oleh petani itu sendiri. Keempat unsur tadi tidak dapat dipisahkan dan kedudukannya dalam usahatani adalah penting. (Hernanto, 1998 dalam Chendrik AS, 2007).

Ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki sebaik-baiknya dan dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (*output*) yang melebihi masukan (*input*). (Soekartawi, 1995).

a. Penyiapan Lahan.

Pada umumnya untuk padi sawah, benih harus disemai terlebih dahulu di tempat persemaian. Bibit padi yang disemai dapat dipindahkan ke lahan yang telah diolah jika telah berumur 25-40 hari. Benih disemai selama 21—28 hari, kemudian dicabut dan ditanam di areal yang telah disiapkan. Untuk mempercepat perkecambahan, benih direndam terlebih dahulu di dalam air selama 2 x 24 jam.

b. Penanaman.

Pengolahan tanah sawah terdiri dari beberapa tahap yaitu pembersihan, pencangkulan atau pembajakan, dan penggaruan. Kedalaman penanaman bibit di lahan sebaiknya 3-4 cm dengan tiap lubangnya 2-3 batang bibit.

c. Penyiangan.

Penyiangan dapat dilakukan dengan landak dan cangkul kecil, namun pada saat ini petani sudah banyak yang menggunakan herbisida untuk memberantas rumput.

d. Pemupukan.

Pemupukan dilakukan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman, pertumbuhan tanaman, dan proses reproduksi. Pupuk yang digunakan petani berupa pupuk alami (pupuk organik) dan pupuk buatan (pupuk anorganik). Pemberian pupuk dilakukan sebanyak 2-3 kali.

e. Pemeliharaan tanaman.

Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan beberapa cara yaitu penyiangan yang dilakukan secara intensif agar tanaman tidak terganggu oleh gulma, serta pemberantasan hama dan penyakit apabila terjadi serangan hama dan penyakit dengan menggunakan insektisida.

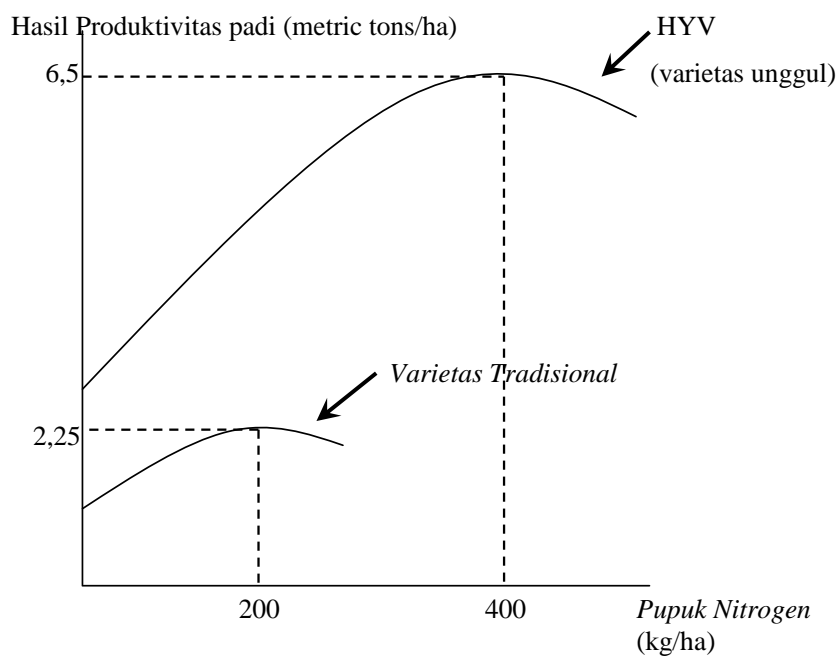
f. Panen.

Menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung tahun 2005 (dalam Chendrik AS, 2007), saat panen yang tepat adalah pada waktu biji telah masak fisiologis, atau apabila 90 % butir padi pada malai telah menguning (masak fisiologis optimal). Setelah dipanen gabah harus segera dikeringkan agar diperoleh rendemen dan mutu beras yang baik.

2. Teori Ekonomi Pupuk

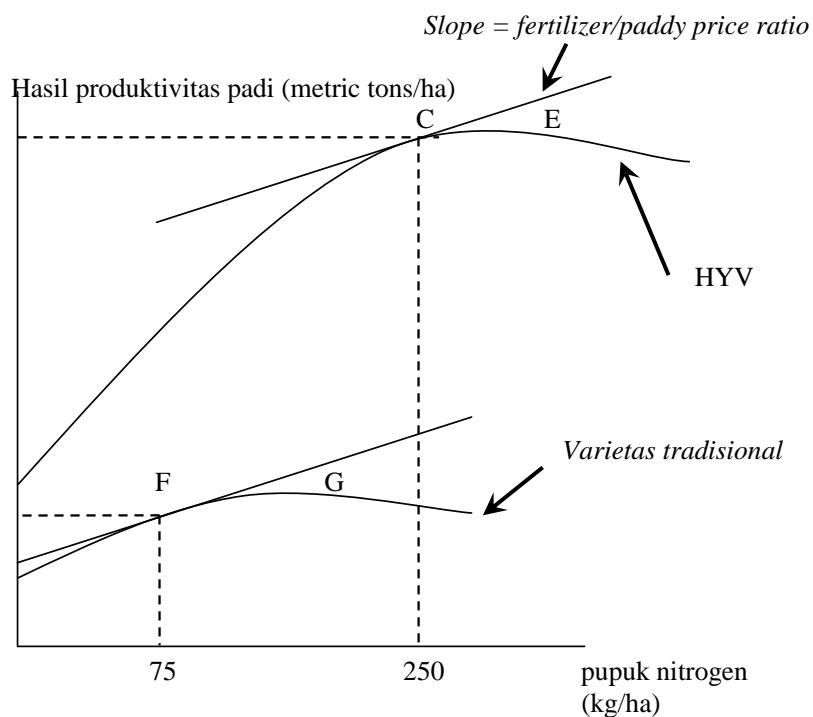
Pada tahun 1984, Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengekspor beras yaitu dengan dicapainya swasembada beras. Salah satu faktor yang menentukan upaya peningkatan produksi padi adalah penggunaan benih unggul dan pemakaian pupuk yang tepat. Pemupukan merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan karena erat kaitannya dengan pemberian nutrisi tanaman. Pemberian nutrisi dengan komposisi dan dosis yang tepat dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan kuantitas dan kualitas tanaman padi.

Penerapan pemupukan berimbang N, P, dan K untuk tanaman padi sudah berkembang sejak tahun 1978 namun belum semua petani melakukan sesuai teknologi yang dianjurkan. (Deptan 2002 dalam Abdi Tani, 2003). Pada umumnya penggunaan pupuk oleh petani masih cenderung kepada penggunaan pupuk N dan P, sedangkan pupuk K masih kurang mendapat perhatian. Penggunaan pupuk sejenis secara terus menerus cenderung menyebabkan semakin merosotnya produktivitas tanah yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas tanaman padi. Pemupukan yang benar harus memperhatikan 6 (enam) tepat, yaitu : (a) Tepat Jenis, (b) Tepat Dosis, (c) Tepat Tempat, (d) Tepat Mutu, (e) Cara Penggunaan, dan (f) Tepat Waktu.



Gambar 3. Kurva respon pupuk terhadap padi/ beras.

Pada gambar 3, kedua kurva mengandung “*deminishing returns*” terhadap penggunaan pupuk sebagai kuantitas dari peningkatan urea, suatu kenaikan hasil tetapi berada pada level “*deminishing*” sepanjang kurva. Gambar ini menunjukkan bahwa hasil produksi maksimum secara biologis terbatas (pada titik G pada kurva bawah dan titik E pada kurva atas), dan hasil produksi menurun jika penggunaan pupuk urea di luar batas.

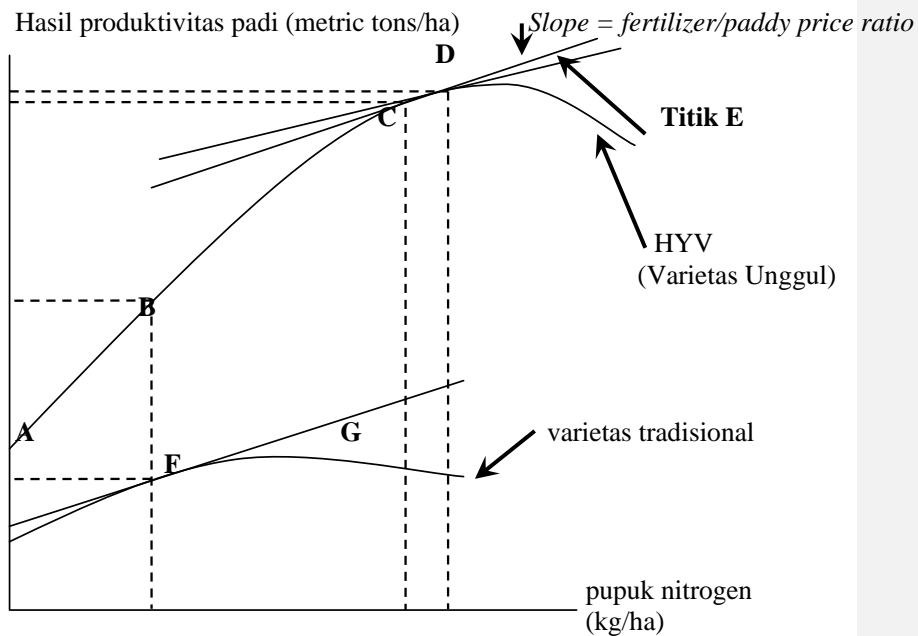


Gambar 4. Level optimum penggunaan pupuk.

Pada gambar tersebut menunjukkan dua kurva yang sama, akan tetapi level optimum ekonomis penggunaan urea ditunjukkan pada masing-masing kurva untuk memberikan harga akan beras dan pupuk. Level keuntungan maksimum penggunaan urea berada pada titik F untuk kurva bawah dan titik C untuk kurva atas, sedangkan garis target pada masing-masing titik

merepresentasikan rasio harga pupuk terhadap harga padi. Pada titik ini, kondisi keuntungan maksimum tercapai jika MVP (*marginal value product*) sama dengan MFC (*marginal factor costs*).

Masalahnya adalah bagaimana membujuk mayoritas petani untuk beralih dari F ke C atau dari 0 ke C. Beberapa ekonom mengatakan bahwa pusat permasalahan ini terletak pada keyakinan akan fungsi produksi atau potensial teknologi sebagai realisasi dari hasil pada level C.



Gambar 5. Efek insentif dari harga pupuk yang rendah.

Pada gambar ini, perkembangan teknologi khususnya seperti kemajuan benih unggul, rumah tangga petani akan membuat keputusan dalam upaya mendapatkan keuntungan. Petani cenderung akan setia pada praktek usahatani, bentuk input, dan level input yang mereka telah ketahui. Untuk

membujuk petani menggunakan metode baru, diperlukan demonstrasi akan pertambahan hasil dari adanya perubahan, dan satu-satunya cara adalah menyediakan insentif dalam bentuk harga yang murah atau rendah untuk input tersebut dimana petani harus menggunakan dalam kuantitas yang benar. Meskipun dengan adanya teknologi yang lebih maju, pada gambar 5, petani lebih memilih untuk tidak menggunakan pupuk sama sekali (pada titik A), atau setia pada level penggunaan pupuk yang telah terbiasa seperti yang digunakan pada teknologi yang sebelumnya (titik B). Ini menyebabkan ketimpangan antara hasil yang mungkin akan tercapai sebagai akibat perubahan teknologi, dan tingkat hasil yang secara actual diperoleh dari tetap berada di level yang sama akan penggunaan pupuk. Inilah yang dimaksud dengan “Ketidakseimbangan dinamis antara level ekonomis akan hasil optimum (titik C) dan level hasil aktual (titik A atau titik B).

3. Konsep Perilaku Petani

Dengan kemampuan memilih suatu teknologi yang bermanfaat, petani menggunakan kekuatan berpikir sebagai bahan pertimbangannya.

Kekuatan berpikir petani dalam memilih teknologi sebagai bentuk berperilakunya adalah syarat dengan pertimbangan-pertimbangan selektif.

Ketika individu petani mendengar atau melihat suatu inovasi teknologi, maka muncul stimulus yang diterima alat inderanya, kemudian melalui proses persepsi suatu inovasi teknologi baru yang ditangkap oleh indera sebagai sesuatu yang berarti dan bermanfaat baginya. Melalui suatu

interpretasi dan pemaknaan dari suatu teknologi maka muncul keyakinan dan kepercayaan terhadap inovasi teknologi tersebut. Akan tetapi individu petani masih memerlukan pembuktian terhadap kebenaran inovasi tersebut melalui uji coba atau melihat kepada sesama petaninya yang telah mencoba.

Davidoff (dalam Walgito, 2006) mengatakan bahwa stimulus yang diterima alat indera, kemudian melalui persepsi sesuatu yang diindra tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. Bentuk keputusan berperilaku merupakan tindakan individu untuk menerapkan inovasi teknologi yang telah diyakini dan dibuktikan. Belajar adalah memperoleh dan memperbaiki kemampuan untuk melaksanakan suatu pola sikap melalui pengalaman dan praktek (Van den Ban dan Hawkins, 2000). Proses belajar sosial yang sering dilakukan petani dalam menjaring informasi inovasi teknologi baru bersifat pembelajaran observasional.

Petani banyak belajar dari pengalamannya sendiri maupun pengalaman orang lain tentang suatu inovasi teknologi dengan mencoba serangkaian tindakan yang beragam. Tingkat tindakan yang dilakukan petani tergantung pada tingkat manfaat dan keuntungan yang akan diterima.

Levis dalam Rachmawati (2007) menyatakan bahwa adopsi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu inovasi sejak mengenal, menaruh minat, menilai, sampai menerapkan. Menurut Junaidi (2007), adopsi inovasi mengandung pengertian yang kompleks dan

dinamis. Hal ini disebabkan karena proses adopsi inovasi sebenarnya menyangkut proses pengambilan keputusan, dimana dalam proses ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Banyak kenyataan petani biasanya tidak menerima begitu saja, tetapi untuk sampai tahapan mereka mau menerima ide-ide tersebut diperlukan waktu yang relatif lama.

Perubahan penerapan atau adopsi teknologi oleh petani dari sistem tradisional ke sistem modern merupakan salah satu bentuk yang nampak dari perubahan sikap dan perilaku petani. Berkaitan dengan adopsi teknologi, seorang individu petani akan selalu menilai suatu inovasi teknologi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein dalam Azwar (2002) yang mencoba melihat perilaku yang berdasarkan pada asumsi-asumsi : (a) bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, (b) bahwa manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, (c) bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka.

Bulu (2010) menjelaskan bahwa tingkat adopsi inovasi dapat diukur dari kualitas adopsi dan kuantitas adopsi. Kualitas adopsi diartikan sebagai ketepatan dalam menerapkan komponen inovasi dari usahatani tertentu secara sempurna. Kuantitas adopsi adalah jumlah penerapan komponen inovasi dari usahatani tertentu sesuai anjuran.

Perilaku dapat mempengaruhi cara berfikir petani dalam pengelolaan usahatani yang sudah dilakukan sejak dahulu kala. Pengelolaan usahatani

yang sudah dilakukan sejak dulu, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Cara berfikir petani diturunkan dari generasi tua ke generasi muda dalam perjalanan sosialisasi primer. Manusia sebagai sistem sosial berguna karena memberi kesan rasional yang terkait dengan sistem lingkungan. Sekalipun cara-cara budidaya yang dilakukan oleh para petani dalam bercocok tanam tanaman padi sudah sangat tinggi, tetapi kebiasaan-kebiasaan tradisional masih melekat pada sebagian besar petani.

(www.wordpress.com)

Pemupukan Berimbang termasuk dalam pendekatan yang ditempuh dalam menerapkan teknologi budidaya padi sawah yang spesifik lokasi (spesifik lokasi ditentukan berdasarkan karakteristik biofisik dan sosial ekonomi) dengan mengintegrasikan berbagai komponen teknologi yang inovatif, dinamis, dan kompatibel untuk dapat memecahkan permasalahan setempat sehingga timbul efek sinergis. Menurut Makarim *et al* (2004), efek sinergis berarti efek komponen teknologi secara bersama-sama lebih besar dari penjumlahan efek teknologi secara individual. Karena lahan sawah mempunyai tingkat kesesuaian berbeda dan unsur yang menyebabkan perbedaan itu juga tidak sama, maka kombinasi komponen teknologi di satu lokasi dapat berbeda dengan lokasi lainnya.

Pemupukan Berimbang yang terkonsep pada Pengelolaan Hara Spesifik Lokasi merupakan suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan sistem atau

pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi yang dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik lokasi.

Dalam proses adopsi, seseorang tidak dapat dengan serta merta mengadopsi suatu inovasi. Banyak faktor yang dipertimbangkan oleh petani untuk dapat menerima sebuah inovasi. Menurut Fliegel, *et al* (1971, dalam jurnal penelitian Santoso dkk, 1983), menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi sikap petani dalam mengadopsi teknologi baru pertanian sebagai berikut :

- a. Keuntungan relatif bila teknologi tersebut diadopsi.
- b. Kecocokan teknologi baru tersebut dengan norma kebudayaan setempat dan lingkungan fisik yang ada.
- c. Hasil pengamatan petani itu sendiri terhadap petani lain yang sedang atau telah mencoba teknologi baru tersebut, sebagai dasar peletakan kepercayaan.
- d. Kondisi ekonomi yang ada, misalnya jumlah modal yang tersedia, ada tidaknya pasar sarana untuk membeli masukan dan menjual produksinya dan bagaimana konsekuensi kenaikan hasil terhadap harga produksi dan peralatan petani.

Meningkatnya jumlah penduduk, lambatnya pertumbuhan produktivitas padi dan luas panen, mengakibatkan produksi beras belum mampu memenuhi permintaan beras. Pemerintah berupaya meningkatkan produksi beras untuk memenuhi permintaan beras melalui pendekatan

intensifikasi dan extensifikasi. Salah satu program intensifikasi tersebut adalah penggunaan pupuk. Munculnya kebijakan subsidi pupuk sistem pola tertutup yang dikeluarkan pemerintah tentunya berdampak terhadap perilaku petani dalam penggunaan pupuk mengingat perbedaan preferensi petani padi terhadap pupuk di masing-masing wilayah tidak sama dan tentunya akan berimbas pada penggunaan pupuk itu sendiri.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasionalisasi Petani dalam Penggunaan Pupuk Bersubsidi

Rasionalisasi petani merupakan proses, cara, perbuatan menjadikan bersifat rasional, perbaikan dalam minimalisasi biaya dan memaksimalkan keuntungan (Alfiansyah, 2009). Rasionalisasi petani dalam penggunaan pupuk bersubsidi, menurut Rusastra dkk (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam pemakaian pupuk yakni kemampuan petani dalam membeli pupuk, ketersediaan pupuk di pasaran, dan kemudahan petani mendapatkan pupuk.

Kemampuan petani dalam membeli pupuk dilihat dari pendapatan yang diperoleh petani dari usahatani padi sawahnya. Faktor ekonomi tersebut akan mempengaruhi petani dalam pemakaian pupuk dengan daya beli yang dimiliki oleh petani. Pendapatan usahatani yang diterima merupakan hasil selisih dari penerimaan dikurangi biaya, dimana penerimaan merupakan harga yang didapatkan dari hasil produksi yang dikalikan dengan harga hasil produksi (harga gabah).

Ketersediaan pupuk di pasaran merupakan salah satu faktor yang diduga mempengaruhi pemakaian pupuk. Ketersediaan pupuk memiliki arti bahwa semakin mudah petani memperoleh sarana produksi pupuk, maka kebutuhan akan pupuk tersebut tidak menjadi kendala bagi petani dalam menggunakan pupuk pada usahatani padi sawahnya. Sehingga petani tidak mengalami hambatan atau kendala saat waktu melakukan pemupukan.

Menurut Lionberger (1960) dalam Oktaria (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan seseorang dalam mengadopsi inovasi, yaitu :

- a. Luas lahan usahatani, semakin luas lahan usahatannya biasanya semakin cepat dalam mengadopsi inovasi.
- b. Tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat pendapatannya biasanya semakin cepat dalam mengadopsi inovasi.
- c. Umur, semakin tua biasanya semakin lamban untuk mengadopsi inovasi dan cenderung hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa diterapkan.
- d. Tingkat partisipasi dalam kelompok atau organisasi, orang yang suka bergabung dengan orang-orang di luar lingkungan sendiri maupun di luar sistem sosialnya biasanya lebih inovatif.
- e. Sumber informasi yang dimanfaatkan, golongan yang inovatif biasanya memanfaatkan beragam sumber info, antara lain dari lembaga pendidikan, dinas-dinas terkait, lembaga penelitian, media massa, dan tokoh-tokoh (petani) setempat.

Menurut Ellis (1992), perbedaan varietas turut mempengaruhi dalam penggunaan pupuk. Pada varietas tradisional penggunaan pupuk lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan pupuk pada varietas unggul, hal ini berdampak pada hasil produksi. Hasil produksi yang didapatkan dengan kombinasi antara pupuk dan varietas dapat membuat petani lebih rasional dalam usaha memaksimalkan keuntungan yang akan didapatkan.

Adopsi suatu teknologi oleh petani berkaitan erat dengan perilaku petani sebagai pengelola usahatannya. Perilaku petani sebagai pengelola usahatannya akan dipengaruhi oleh faktor *internal* dan *external*, yang meliputi faktor sosial antara lain tingkat pendidikan, pengalaman bertani, faktor ekonomi misalnya tingkat pendapatan; dan faktor kelembagaan seperti status penguasaan lahan (Syafa'at, 1990). Petani yang mempunyai lebih banyak pengalaman akan lebih mudah mengetahui kegunaan teknologi baru yang diperkenalkan, sehingga petani lebih mudah terdorong untuk menguasai dan menerapkan teknologi. Menurut Hanum (2010), dalam hal adopsi teknologi, produktivitas dan biaya pupuk ikut turut menjadi dasar pertimbangan petani dalam suatu adopsi teknologi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi rasionalisasi petani dalam penggunaan pupuk bersubsidi adalah pendapatan, ketersediaan pupuk, lama berorganisasi, sumber informasi, lama berusahatani, varietas, produktivitas, biaya pupuk. Selain itu, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kedinamisan penggunaan pupuk bersubsidi, yakni umur, tingkat pendidikan, lama berusahatani, luas

lahan, dan varietas. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari masing-masing variabel yang telah dijelaskan terhadap penggunaan pupuk bersubsidi, digunakan analisis logit. Melalui analisis logit, pengaruh variabel tersebut dikaitkan dengan kemungkinan (*probabilitas*) petani menggunakan pupuk sesuai anjuran atau tidak sesuai anjuran.

5. Konsep Analisis Logit

Analisis regresi digunakan untuk melihat hubungan antara satu atau lebih peubah penjelas dengan peubah respon. Model regresi yang digunakan tergantung dari peubah kuantitatif dan peubah kualitatif. Pada penelitian sosial, peubah yang diamati sebagian besar merupakan data kategorik termasuk data biner. Model yang sering digunakan untuk menganalisis peubah respon berskala biner adalah model logit. Model logit adalah sebagai berikut :

$$P_i = F(Z_i) = F(\alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n)$$

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n)}}$$

dimana untuk mencari Z_i digunakan rumus sebagai berikut :

$$Z_i = \ln \frac{P_i}{1 - P_i} = (\alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n)$$

Keterangan :

P_i = Peluang seorang petani akan mengambil keputusan terhadap penggunaan pupuk bila X_i diketahui.

Z_i = Peluang petani ke- i untuk mengambil keputusan terhadap penggunaan pupuk dimana $Z = 1$ untuk petani yang mengikuti rekomendasi anjuran penggunaan pupuk dan $Z = 0$ untuk petani yang tidak mengikuti rekomendasi anjuran penggunaan pupuk.

X_n = Variabel penjelas.

e = Bilangan logaritma natural, yaitu 2,718.

α = Intersep

Regresi Logit merupakan teknik analisis data yang dapat menjelaskan hubungan antara peubah respon yang memiliki dua kategori dengan satu atau lebih peubah penjelas berskala kontinyu atau kategori. Pengujian terhadap parameter-parameter model dalam regresi ini dilakukan dengan uji nisbah kemungkinan yaitu uji G.

Uji G digunakan untuk memeriksa kebaikan model sehingga dapat menentukan apakah peubah-peubah bebas dalam model mempunyai hubungan yang nyata dengan peubah responnya. Apabila peubah respon yang digunakan merupakan data proporsi atau peubah biner, maka fungsi hubung yang digunakan adalah fungsi hubung logit dengan sebaran baku yang terletak antara 0 dan 1. Sebaran peubah logit merupakan peubah kualitatif yang menggunakan sebaran binomial. Untuk mengetahui peran seluruh variabel di dalam model secara bersama-sama dapat digunakan uji nisbah kemungkinan yaitu uji-G dengan statistik ujinya berdasarkan hipotesis:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_1 : \text{paling sedikit ada satu } \beta_n \neq 0 \text{ (} j = 1, 2, \dots, 9 \text{)}$$

Kaidah pengujian adalah :

jika $G\text{-hitung} < \chi^2 (P, \alpha)$, maka terima H_0 ,

$G\text{-hitung} > \chi^2 (P, \alpha)$, maka terima H_1 .

Sedangkan untuk uji nyata parameter secara parsial dapat digunakan dengan uji-Wald. Statistik uji-Wald mengikuti sebaran normal dengan berdasarkan hipotesis :

$$H_0 : \beta_j = 0$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0$$

Kaidah pengujian adalah :

jika $W\text{-hitung} < Z_{\alpha/2}$, maka terima H_0 ,

$W\text{-hitung} > Z_{\alpha/2}$, maka terima H_1 .

6. Keragaan dan Dinamika Sistem Distribusi Pupuk

Proses pembangunan pertanian di masa mendatang akan diwarnai oleh berbagai perubahan yang cepat dan akan memberikan dampak nyata terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat petani pedesaan.

Globalisasi ekonomi akan meningkatkan kompetisi yang makin tajam bukan saja dalam memasarkan berbagai produk antar negara tetapi juga dalam menarik investasi asing. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu meningkatkan pertumbuhan dan daya saing produknya termasuk produk pertanian.

Pupuk merupakan faktor produksi penting dalam usaha pertanian, khususnya usahatani padi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kinerja ekonomi pupuk, baik dari segi produksi, ketersediaan, harga, maupun penggunaannya oleh petani. Kebijakan Pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan

dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum Kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik, dan akibatnya tingkat penghidupan petani yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih sempurna.

(Mubyarto, 1995).

Subsidi adalah pemberian pemerintah kepada para produsen dengan maksud meringankan beban pengeluaran (biaya operasional) produsen. Subsidi harga sarana produksi diberlakukan pemerintah terhadap pupuk, benih, pestisida, dan kredit. Di antara input utama tersebut pupuk mendapat tingkat subsidi paling besar dan diterapkan sejak tahun 1971. Subsidi pupuk mampu mendorong petani membeli pupuk dalam jumlah memadai untuk meningkatkan produksi. Beberapa argumen pemberian subsidi terhadap pupuk adalah untuk : (1) Merangsang penggunaan pupuk oleh petani sebagai bagian dari penerapan teknologi pertanian dan peningkatan produksi pangan, (2) Dalam rangka menstabilitas harga di tingkat petani, dan (3) Lebih mengefisienkan transfer sumberdaya dari pemerintah ke petani guna membantu pembangunan di pedesaan.

(Rusastra dkk, 2002).

Kebijakan pokok pemerintah yang terkait dengan pupuk yaitu subsidi harga (Harga Eceran Tertinggi) dan pola distribusi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi pupuk dengan tujuan agar sarana produksi tersebut terjamin ketersediannya dengan harga yang stabil dan

terjangkau oleh daya beli petani. Di sisi lain, pihak produsen dan pelaku pendistribusian juga menerima keuntungan dan margin yang wajar sehingga dapat memberikan insentif dalam pengembangan usahanya. Kebijakan harga pupuk di tingkat petani adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dalam menetapkan HET ada beberapa komponen biaya yang dipertimbangkan antara lain adalah harga pokok produksi, biaya distribusi, dan fee untuk penyalur dan pengecer.

Sistem distribusi pupuk terus dibenahi yang didasarkan atas kinerja kebijakan distribusi sebelumnya. Dalam pendistribusian pupuk, berbagai kebijakan telah diterapkan dan dapat digolongkan dalam beberapa periode.

1. Periode 1960 – 1979

Periode ini merupakan periode awal pengaturan distribusi pupuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung program Bimas dengan menyalurkan pupuk secara kredit pada petani. Selama periode ini, pengadaan dan penyaluran pupuk dilakukan di bawah satu tangan, tetapi selanjutnya oleh banyak pelaku sehingga tersedia peluang bisnis pupuk bagi setiap badan usaha. Pada periode ini tidak ada ketentuan stok sehingga tidak ada jaminan ketersediaan.

2. Periode 1979 – 1998

Periode ini dikatakan sebagai era pupuk disubsidi dan ditataniagakan. Periode ini dibedakan atas dua selang waktu.

a. Periode 1979 – 1993

Periode ini dikatakan sebagai era regulasi penuh dengan PT. Pusri sebagai penanggung jawab tunggal. Pada periode ini, pengadaan dan

penyaluran relatif aman dan jika ada kasus kekurangan pupuk di suatu daerah dapat ditangani dengan mudah.

b. Periode 1993 – 1998

Pada periode ini merupakan revisi kebijakan sebelumnya atas pertimbangan anggaran subsidi yang semakin besar. Pada periode ini jenis pupuk yang disubsidi ditambah, harga urea untuk subsektor tanaman pangan berbeda dengan harga untuk subsektor perkebunan. Namun selama periode ini dijumpai banyak penyimpangan di lapangan, misalnya terjadi aliran/rembesan pupuk bersubsidi (untuk tanaman pangan) ke penggunaan lain, penurunan tingkat penggunaan pupuk, pupuk urea bersubsidi diekspor secara ilegal, terjadi kelangkaan pupuk di beberapa daerah, dan tingginya harga pupuk di tingkat petani.

3. Periode 1998 – 2001

Periode ini dikatakan sebagai era pasar bebas dan subsidi pupuk dihapuskan. Kebijakan ini ternyata tidak mampu memperbaiki mekanisme penyaluran dan distribusi pupuk. Kelangkaan pupuk dan lonjakan harga tetap terjadi. Surat Keputusan Menperindag bulan Maret 2001 mengatur kembali pengadaan dan penyaluran pupuk untuk sektor pertanian. Namun demikian, kasus kelangkaan pupuk dan tingginya harga di pasaran masih tetap terjadi.

4. Periode 2002-2008.

Pada periode ini pemerintah menerapkan subsidi pupuk dimana pupuk didistribusikan melalui mekanisme pasar yang dikendalikan

dimana pada lini 1 sampai dengan lini 2 dilakukan oleh produsen sedangkan dari lini 3 sampai lini 4 dilakukan oleh distributor dan kios. Pada periode ini pun mengalami kelangkaan pupuk dan lonjakan harga, dimana tahun 2008 menjadi evaluasi pembenahan distribusi dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.

5. Periode 2009 – 2010

Pada periode ini pemerintah menerapkan distribusi pupuk bersubsidi pola tertutup mulai Januari 2009 bertujuan untuk menghindari terjadinya kelangkaan pupuk dan penyimpangan pendistribusian pupuk ke sektor lain selain pertanian. Sistem Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan pola distribusi tertutup melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dengan demikian, untuk mendapatkan pupuk, petani harus tergabung dalam kelompok tani dan mengisi kebutuhan pupuknya dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Secara teknis distribusi pupuk bersubsidi dengan pola tertutup sesuai Permendag dan Permentan tegas mengatur tanggung jawab produsen (Lini I – II), distributor (Lini III), dan penyalur (Lini IV).

Peraturan yang digunakan untuk distribusi tertutup, yakni Permendag 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, serta Permentan

57/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008, junto Permentan Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2009.

Kebijakan Pupuk Bersubsidi Sistem Pola Tertutup

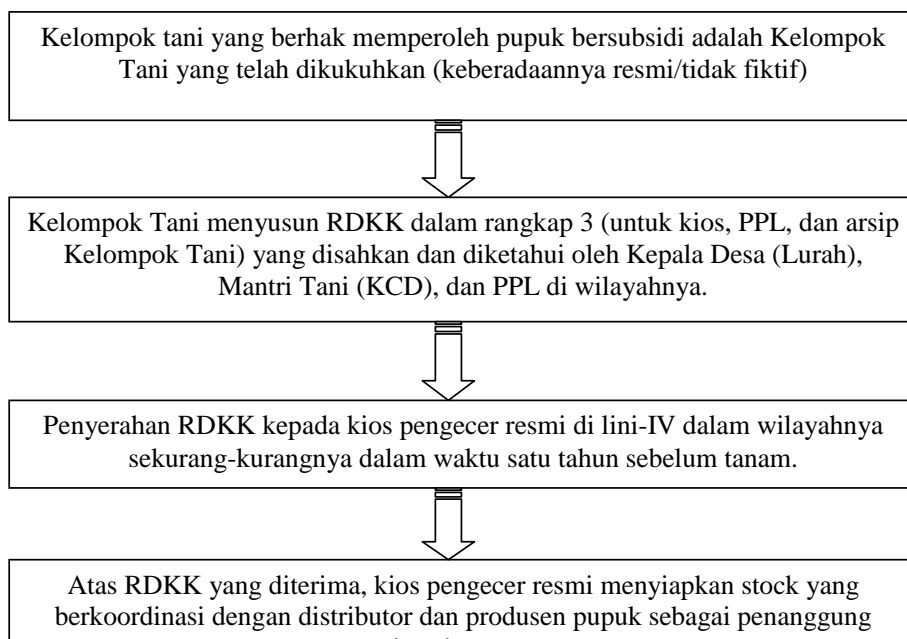
Kebijakan subsidi pupuk untuk petani setelah dihapusnya program Bimas dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2002, dimana dengan adanya keterbatasan dana subsidi pendistribusiannya diserahkan kepada produsen dimana penyalurannya sampai lini IV dilakukan oleh distributor dan kios. Dalam pelaksanaannya sampai dengan tahun 2008 dirasakan tidak efektif dan banyak terjadi pupuk tidak sampai ke petani. Dengan pertimbangan tersebut, pada tahun 2008 Pemerintah melalui Menteri Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/09/2008, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. Banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ini, antara lain : Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa di setiap wilayah propinsi di Indonesia. Kebijakan ini menetapkan berbagai hal-hal penting didalamnya yaitu peruntukkan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, penyaluran HET dan pupuk bersubsidi, pengawasan, dan pelaporan dari hasil pelaksanaan kebijakan tersebut.

Yang khusus dan membedakan dalam Peraturan Menteri 2008 mengenai subsidi pupuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian tahun 2002 s/d 2008 adalah bahwa penyaluran pupuk di lini IV kepada petani, hanya dapat diberikan kepada petani yang telah menyerahkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dikoordinir oleh ketua kelompok petani. Dengan adanya *point* ini, diperhitungkan kecil kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhannya dengan harga subsidi sehingga penerapan penggunaan pupuk sesuai rekomendasi teknologi spesifik lokasi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi yang akhirnya akan menghasilkan produksi dan pendapatan yang tinggi. Selain itu dengan pola tertutup ini petani mempunyai keleluasaan untuk melakukan variasi pemupukan sesuai dengan keyakinannya yang tentunya diarahkan oleh penyuluh lapang karena tersedianya pupuk subsidi selain pupuk anorganik juga pupuk organik.

(1). Pola Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sistem Pola Tertutup di Propinsi Lampung

Penyaluran harus memakai Pola sistem tertutup dimana dasar penyaluran ke petani adalah RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). RDKK harus mencantumkan dengan jelas hal sebagai berikut : (1) Nama dan Alamat Kelompok, (2) Nama Petani, (3) Jenis Komoditi, (4) Luas lahan, (5) Jenis dan Jumlah Pupuk, (6) Jadwal Kebutuhan, dan (7) Tanda Tangan Petani.

RDKK dibuat bersama-sama oleh kelompok tani dan PPL yang dipandu oleh KCD serta diketahui oleh Kepala Desa dan KCD. Pembuatan RDKK disponsori oleh pengecer/distributor dan diketahui oleh Kadis Pertanian. Koordinasi dan rekonsiliasi di tingkat Kabupaten antara pengecer dan distributor dilakukan minimal 1 kali dalam satu bulan untuk membahas perihal realisasi bulan berjalan dan rencana kebutuhan bulan akan datang yang dihadiri oleh Komisi Pengawasan Pupuk beserta instansi terkait. Koordinasi dan rekonsiliasi di tingkat Kecamatan juga dilakukan antara pengecer, instansi terkait, komisi pengawas pupuk, KTNA, HKTI, dan Gapoktan. Adapun mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi sistem pola tertutup dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sistem Pola Tertutup.

1. — ~~Bagaimanakah mekanisme dan jumlah penyerapan pupuk Urea dan Superphos/Phosphat pada usahatani padi sawah dengan diberlakukannya kebijaksanaan~~ Kebijakan kebijakan Kebijakan subsidi pupuk sistem tertutup di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Formatted: Space After: 10 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,27 cm

Pupuk Urea dan Superphos bersubsidi khusus diperuntukkan bagi petani tanaman pangan yang terdaftar dalam Kelompok Tani yang data kebutuhan pupuknya terdaftar pada RDKK. Sistem pupuk bersubsidi yang bersifat tertutup ini dipertegas dengan dikeluarkannya Permentan No. 42/Permentan/OT.140/09/2008 terhitung sejak tanggal diberlakukannya yaitu 1 Januari 2009. Sebelumnya mekanisme subsidi pupuk bersifat terbuka, dimana petani dapat membeli pupuk di kios mana saja dan kapan saja. Namun, karena banyaknya penyimpangan yang terjadi karena sistem terbuka ini mengakibatkan kerugian banyak ditanggung oleh para petani yang sangat membutuhkan pupuk, maka untuk menghindari dan meminimalize bentuk penyimpangan yang telah merugikan petani maka sistem terbuka ini diganti menjadi Sistem pupuk bersubsidi tertutup. Sehingga sistem distribusi pupuk bersubsidi tertutup ini memungkinkan petani untuk mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan dan sesuai dengan harga subsidi. Selain itu memungkinkan petani untuk melakukan pemupukan sesuai anjuran teknologi spesifik lokasi dan memenuhi kriteria mekanisme pupuk yang baik dan benar, yaitu “6 (enam) Tepat”, Tepat secara jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, serta tepat secara mutu.

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

2. — ~~Bagaimanakah penyerapan pupuk subsidi oleh petani pada usahatani padi sawah di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah telah meningkatkan produksi dan produktivitas.~~

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Line spacing: single, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,27 cm

Usaha budidaya padi sawah di pedesaan merupakan usaha yang banyak dilakukan sebagian besar masyarakat pedesaan sehingga maju mundurnya usaha ini akan sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan. Petani akan sangat terpengaruh dengan keuntungan yang diperolehnya dalam berusaha. Apabila usahatannya kurang menguntungkan kemungkinan besar petani akan beralih ke usaha lain. Untuk itu, perlu dilihat apakah dengan adanya kebijakan pemerintah dalam kebijakan subsidi pupuk pola tertutup memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebijaksanaan Kebijakan kebijakan Kebijakan subsidi pupuk pola terbuka. Selain itu juga ingin diketahui apakah usahatani padi sudah memberikan pendapatan yang layak bagi petani. Untuk mengetahui sejauh mana pendapatan petani padi sawah sudah cukup layak perlu dibandingkan dengan upah minimum propinsi (UMP) dan besaran kebutuhan hidup layak (KHL).

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

1. — Tujuan Penelitian

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: No bullets or numbering

Berdasarkan masalah di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk²² mengetahui apakah penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani sesuai dengan kebutuhan petani untuk menerapkan pemupukan sesuai anjuran dengan diberlakukannya Kebijaksanaan Kebijakan Kebijakan Kebijakan pupuk bersubsidi pola tertutup di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah²², dan secara khusus, yaitu :

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

1. Mengetahui mekanisme distribusi dan penyerapan pupuk urea dan superphos di tingkat petani padi sawah di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengetahui penerapan pemupukan padi sawah di tingkat petani apakah lebih baik dan sesuai anjuran pasca diberlakukannya kebijaksanaanKebijakankebijakanKebijakan pupuk bersubsidi pola tertutup di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.
3. Mengetahui pendapatan petani padi sawah pasca diberlakukannya kebijaksanaanKebijakankebijakanKebijakan pupuk bersubsidi pola tertutup di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Line spacing: single

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

- I. Petani, pedagang, dan produsen pupuk sebagai bahan masukan.
 - II. Instansi terkait, sebagai bahan informasi untuk pembuatan kebijakan yang terkait dengan masalah kinerja peningkatan produksi, produktivitas, dan peningkatan pendapatan petani padi serta penerapan teknologi pemupukan spesifik lokasi.
- Peneliti lain, sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: No bullets or numbering

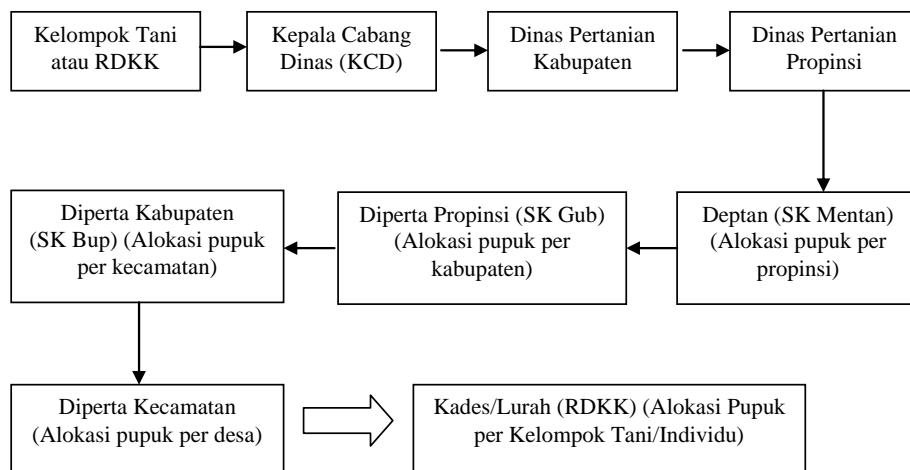
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,9 cm

(1).Dasar Penyusunan RDKK

RDKK dibuat oleh Kelompok Tani yang didampingi oleh KCD dan atau PPL, kemudian RDKK yang telah disusun tersebut diserahkan kepada PPL untuk diberikan kepada KCD. Kemudian KCD akan menyerahkan RDKK tersebut ke tingkat Dinas Pertanian Kabupaten untuk diserahkan kepada Dinas Pertanian Propinsi. Setelah Dinas Pertanian Propinsi menyerahkan usulan RDKK yang telah di arsipkan untuk kebutuhan propinsi, Departemen Pertanian akan meraptnkan dan membahas alokasi yang diusulkan oleh seluruh propinsi yang tentunya akan dibuat pemerataan alokasi pupuk di seluruh propinsi dengan menselaraskan kebutuhan pupuk dan ketetapan alokasi APBN akan subsidi pupuk, sehingga kebutuhan pupuk bersubsidi per

propinsi ditetapkan dan disahkan. Hasil alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut diberitahukan kepada Diperta Propinsi melalui SK Gubernur yang menetapkan alokasi pupuk bersubsidi per propinsi, kemudian SK Gub tersebut dibagi lagi alokasi pupuk bersubsidi untuk tingkat Kabupaten yang menetapkan alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan. Alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan yang ditetapkan oleh SK Bup diberikan kepada Kepala Cabang Dinas untuk membagi alokasi pupuk bersubsidi tersebut kepada petani yang terdaftar pada RDKK kemudian menginformasikan ke pihak PPL yang tentunya akan berkoordinasi kepada petani yang terdaftar pada RDKK. Dasar Penyusunan RDKK dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Dasar Penyusunan Kebutuhan Pupuk (RDKK)

7. Hasil Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Subyek	Metodologi	Tema Utama	Kesimpulan
1990	Nizwar Syafa'at	Risiko Produksi pada Usahatani Padi Sawah	Digunakan fungsi produksi frontier yang diduga dengan perencanaan linier untuk pengukuran efisiensi teknis, sedangkan untuk mengukur sikap petani terhadap risiko digunakan pendekatan maksimisasi kepuasan harapan.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Teknis Relatif dan Sikap Petani dalam Menghadapi Risiko Produksi pada Usahatani Padi Sawah di Lahan Beririgasi Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi teknis usahatani pada lokasi penelitian relatif tinggi (80%) dan secara keseluruhan petani bersikap sebagai penggemar risiko dalam penggunaan pupuk anorganik. 2. Tingkat pendidikan, pengalaman bertani padi, dan jumlah anggota keluarga tidak mempunyai hubungan efisiensi teknis produksi.. 3. Tingkat pendapatan dan curahan tenaga kerja rumah tangga pada kegiatan usaha luar pertanian berhubungan positif dengan efisiensi teknis produksi, namun pada kegiatan usahatani luar padi memiliki hubungan negatif. 4. Efisiensi teknis petani pemilik sama dengan petani penyewa dan kedua-duanya lebih besar dibandingkan petani gadai. 5. Petani yang sumber pendapatannya berasal dari pertanian dan dari luar pertanian bersikap sebagai penggemar risiko dalam penggunaan pupuk anorganik, sedangkan petani yang sumber pendapatannya hanya berasal dari pertanian saja bersikap sebagai penghindar risiko.
2001	Nyak Ilham	Produktivitas Padi di Propinsi Jawa Barat	Digunakan teknik analisis tabulasi silang secara deskriptif untuk mengkaji dampak kebijakan pengendalian distribusi pupuk urea terhadap pola pemasaran, efisiensi pemasaran dan ketersediaan pupuk urea dan pupuk lainnya. Untuk mengetahui efisiensi sistem pemasaran berbagai jenis pupuk dilakukan analisis marjin tataniaga. Ketersediaan pupuk pada lini pemasaran vertikal dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan indikatif.	Pola Pemasaran dan Ketersediaan Pupuk Pasca Kebijakan Pengendalian Distribusi Pupuk Urea Maret 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat pasar bebas tataniaga pupuk, distribusi yang terjadi lebih tertuju pada daerah yang permintaannya tinggi dengan harga yang lebih mahal termasuk untuk ekspor. Akibatnya pada daerah tertentu terjadi kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk SP₃₆ dan KCl pada periode pasar bebas lebih disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah akibat krisis ekonomi, sehingga harga impor bahan baku pupuk SP₃₆ dan Harga KCl meningkat tajam. Penurunan tersebut hanya sesuai tepatnya pada periode MT 2000 kemudian normal kembali. 2. Kondisi setelah Kebijakan Memperindag No. 93 Tahun 2001, Pengadaan Gudang <i>Supply Point</i> Petro Kimia di beberapa kabupaten, dan kebebasan impor pupuk KCl, sistem pemasaran pupuk masih cukup efisien.

2004	Made Antara	Pengalokasian Sumberdaya di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala	<p>Penelitian I : Model analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dipergunakan untuk memberikan gambaran secara deskriptif tentang rasionalitas petani pengalokasikan sumber daya dan digunakan uji-t untuk membandingkan dua desa yang menjadi sampel.</p> <p>Penelitian II : Model analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dipergunakan untuk mengkaji alokasi optimal sumberdaya RT petani di dua desa yang menjadi sampel apabila terjadi perubahan perbaikan efisiensi teknis dan ekonomis.</p> <p>Penelitian III : Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yakni <i>linear programming</i> dalam rangka memaksimalkan tujuan.</p>	Perilaku petani dalam pengalokasian sumberdaya untuk mencapai pendapatan maksimum	<p>3. Analisis indikatif menunjukkan bahwa penggunaan pupuk berimbang masih belum dilaksanakan. Namun untuk tahun 2001 dan 2002 pada tingkat penyalur menjadi lebih baik. Sementara itu pada tingkat pengecer yang menggambarkan kondisi petani di sekitarnya masih mengalami ketimpangan, terutama untuk pupuk KCl dan ZA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku petani dalam menentukan penggunaan faktor-faktor produksi lebih rasional pada desa yang relatif jauh dari perkotaan, walaupun intensitas penyuluhan yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan petani di daerah perkotaan. 2. Petani di Desa Pakuli lebih efisien dalam penggunaan sumberdaya baik sumberdaya sendiri terutama TKDK maupun sumberdaya dari luar (penggunaan pupuk, TKLK dan pinjaman kredit). Sebagai akibatnya, pendapatan rumahtangga tani di Desa Pakuli jauh lebih baik, yaitu 9,5% lebih tinggi dari pendapatan rumahtangga tani di Desa Jono Oge. 3. Petani di dua desa telah optimal dalam pengelolaan sumberdaya. Namun, alokasi optimal yang dicapai oleh kedua desa itu berbeda. Petani di Desa Pakuli mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 4. Adanya perubahan dari luar (<i>external</i>) yang tidak diduga oleh petani berupa kenaikan harga input dan jatuhnya harga output, mengakibatkan petani di kedua desa memiliki peluang untuk menghadapi perubahan itu dengan jalan: (a) memperbaiki efisiensi teknis, (b) meningkatkan pinjaman/kredit dari pelepas uang, dan (c) menjual produksi dalam bentuk beras.
------	-------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Pemikiran

Pada hakekatnya upaya pembangunan pertanian selalu terkait dengan kehadiran 4 (empat) faktor utama yaitu : (a) faktor kebijakan, (b) iptek yang mendukung, (c) partisipasi petani, dan (d) infrastruktur dan pasar. Kombinasi dan interaksi optimal keempat faktor ini mampu menghasilkan sektor pertanian dan usaha pertanian yang bersifat tangguh, progresif, dan artikulatif (Faisal Kasryno, 2002). Kebijakan Subsidi Pupuk merupakan salah satu kebijakan pemerintah selain kebijakan lainnya, seperti kebijakan harga, kebijakan benih, kebijakan impor, dan lainnya yang dimaksudkan untuk mendukung pembangunan pertanian.

Pertanian tanaman pangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh setidaknya-tidaknya dua fakta, yaitu : (1) proporsi penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani tanaman pangan masih sangat besar dan (2) hampir seluruh penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok.

Beras memiliki posisi strategis dalam memelihara kestabilan ekonomi nasional dan juga merupakan bahan pangan pokok bagi 95 persen penduduk Indonesia, sehingga dalam rangka menyeimbangkan angka kebutuhan rakyat dengan ketersediaan pangan beras, tentunya komoditi padi harus dapat ditingkatkan produksi serta produktivitasnya dalam upaya mencukupi kebutuhan pangan nasional tersebut. Adanya kendala dalam upaya pengamanan dan peningkatan produksi dan produktivitas padi akan

mengganggu ketersediaan pangan akan beras yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap stabilitas pangan nasional.

Produksi dan produktivitas padi di Propinsi Lampung, khususnya padi sawah, walaupun cenderung meningkat, namun masih belum mendekati potensi potensial dan pertumbuhannya relatif stagnan dengan pertumbuhan selama 10 tahun hanya rata-rata sebesar 0,55 ku/ha. Hal ini dapat dilihat dari angka rata-rata produktivitas padi propinsi Lampung selama 10 tahun dari tahun 2000-2009 dimana tahun 2000 sebesar 43,32 ku/ha dan 2009 sebesar 48,80 ku/ha. Capaian produktivitas yang relatif stagnan ini kemungkinan disebabkan oleh : (1) Masih belum optimalnya peranan dari input produksi, (2) Sudah jenuhnya capaian efisiensi teknis sehingga perlu adanya adopsi teknologi baru seperti penggunaan benih padi hibrida dan lainnya. Terkait dengan belum optimalnya peranan input, salah satu penyebabnya ditengarai karena petani belum menerapkan pemupukan berimbang pada usahatani sesuai anjuran teknologi.

Ketergantungan petani terhadap pupuk telah menjadi fenomena sejarah pasca revolusi hijau. Pupuk yang pada saat itu menjadi integral dalam akselerasi peningkatan produksi, pada gilirannya telah membuat petani semakin tergantung akan pupuk anorganik tersebut (*minded of fertilizer*). Pupuk bagi petani diyakini sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi khususnya tanaman padi sawah, petani tidak akan menanam apabila tidak memiliki pupuk karena akan merugi.

Pada periode setelah tahun 1993, dimana pupuk ditataniagakan walaupun disubsidi, petani sering kesulitan mendapatkan pupuk dan harganya di atas harga subsidi, mengakibatkan petani tidak mampu membeli pupuk dalam jumlah yang cukup dan akhirnya petani melakukan pemupukan seadanya dan tidak optimal. Adanya kelangkaan pupuk dan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi dikarenakan antara lain : (a) Mekanisme distribusi yang tidak langsung ke petani/konsumen, (b) Pelaksana distribusi pupuk subsidi adalah pelaku pasar yang cenderung berorientasi pada keuntungan, (c) Adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara pupuk yang disubsidi dengan yang tidak disubsidi, dan (d) Adanya pelaku usaha pertanian yaitu perkebunan yang tidak mendapat subsidi pupuk. Hal ini berdampak pada pencapaian produksi yang kurang memuaskan.

Sejalan dengan permasalahan pupuk yang ada dari tahun ketahun, Pemerintah pada tahun 2008 melalui Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan mengeluarkan Kebijakan Subsidi Pupuk yang mengatur Harga Eceran Tertinggi dan Pendistribusian pupuk yang pemberlakuannya dimulai pada tahun 2009, yang dikenal dengan Kebijakan Pupuk Bersubsidi Sistem Pola Tertutup karena mekanisme distribusi pupuk ke petani mensyaratkan penerima subsidi harus terdaftar dalam RDKK.

Petani dengan adanya kemudahan memperoleh pupuk dan jaminan harga yang disubsidi akan cenderung melakukan pilihan alternatif pemupukan yang akan memberikan produksi yang tinggi dan biaya yang rendah. Dalam melakukan pilihan tersebut membuat petani dalam hal penggunaan pupuk

akan cenderung mengkombinasikan sesuai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penggunaan pupuk, sehingga hal ini menyebabkan dinamika penggunaan pupuk di tingkat petani. Umumnya penggunaan pupuk oleh petani masih cenderung kepada penggunaan pupuk N dan P sedangkan penggunaan pupuk K masih kurang mendapat perhatian. Penggunaan pupuk sejenis atau tidak berimbang atau melebihi takaran, secara terus menerus cenderung akan mengakibatkan semakin merosotnya produktivitas tanah yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas padi.

Petani di dalam berusaha tani akan menggunakan pertimbangan yang hati-hati dan sangat memperhitungkan keberhasilan usahanya agar mendapatkan keuntungan yang besar. Demikian pula dalam penggunaan input termasuk input pupuk, petani akan menggunakan rasionya. Rasionalisasi petani dalam penggunaan pupuk yang memperhatikan pemupukan berimbang sesuai anjuran teknologi spesifik lokasi selain akan meningkatkan produktivitas (mencapai optimal) juga akan menurunkan biaya produksi.

Usaha tani padi sawah banyak dijalankan oleh kelompok masyarakat petani dan menghidupi sebagian besar pedesaan, termasuk di Kecamatan Trimurjo yang saat ini sudah cenderung bersifat komersil karena sudah memperhitungkan keuntungan. Dalam upaya petani untuk memperoleh keuntungan, tentunya petani akan berupaya mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Masalah alokasi sumberdaya ini berkaitan erat dengan tingkat keuntungan yang ingin dicapai. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh akan sangat

ditentukan oleh nilai jual hasil produksi dan biaya produksi yang dikeluarkan. Keuntungan maksimum akan tercapai apabila semua faktor produksi telah dialokasikan penggunaannya secara optimal dan efisien. Petani yang saat ini sudah berorientasi pada keuntungan akan mempertimbangkan usahatani yang akan dilakukannya dan memberikan pendapatan yang dapat menghidupi keluarganya.

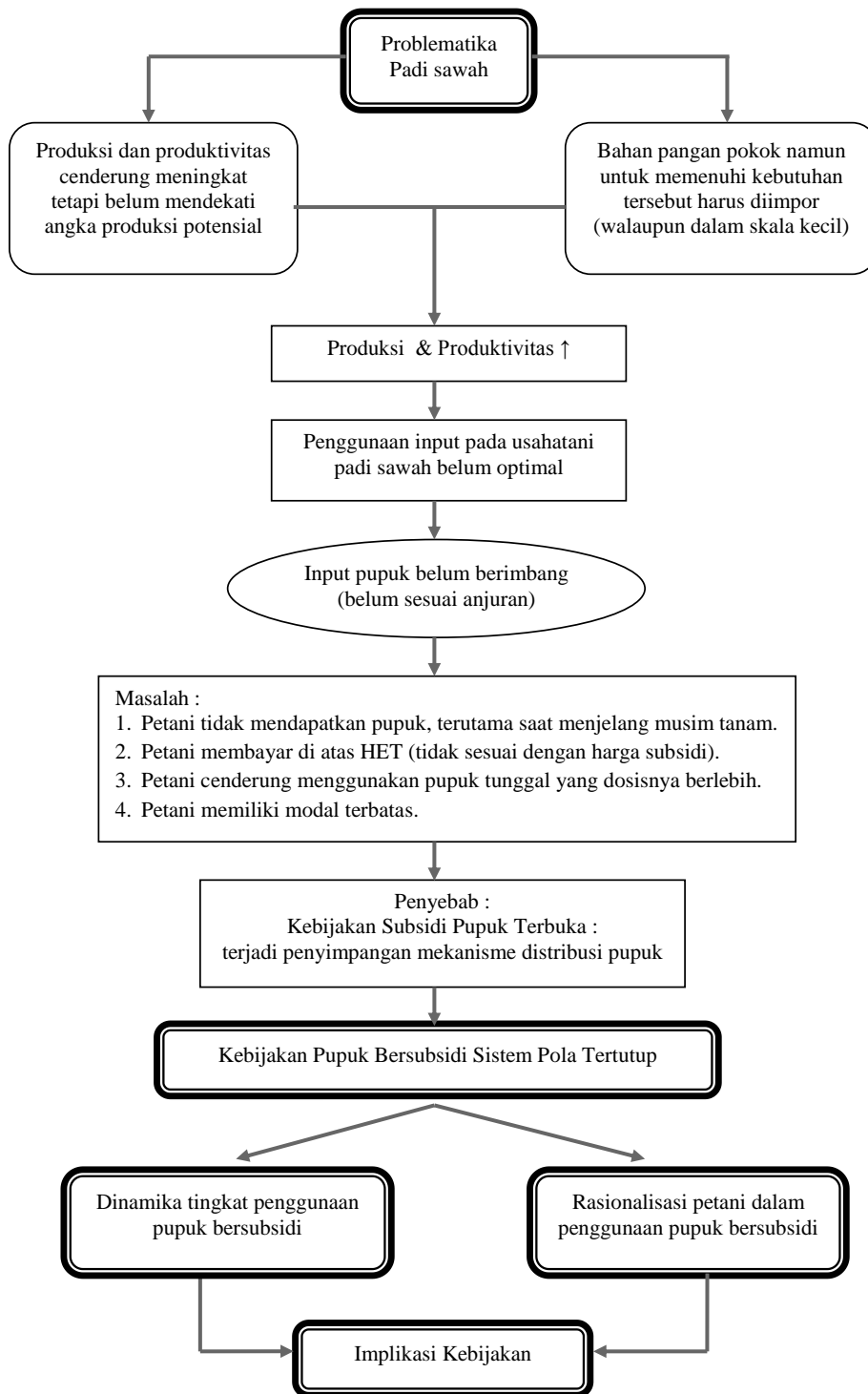
Untuk mengidentifikasi dinamika tingkat penggunaan pupuk bersubsidi di tingkat petani diduga parameter umur, pendidikan, lama usahatani, luas lahan, dan varietas memiliki hubungan dalam kedinamisan penggunaan pupuk bersubsidi tersebut dan dianalisis menggunakan analisis tabulasi silang. Sementara, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rasionalisasi petani dalam penggunaan pupuk bersubsidi dilakukan dengan analisis logit. Besarnya pengaruh variabel-variabel yang diteliti, seperti produktivitas, harga gabah, biaya pupuk, pendapatan usahatani, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani, lama berorganisasi (keterlibatan dalam kelompok tani), sumber-sumber informasi, ketersediaan pupuk, dan varietas. Lebih jelasnya sistematika kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 8.

C. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, antara lain :

1. Diduga dinamika tingkat penggunaan pupuk bersubsidi pada usahatani padi sawah di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah memiliki hubungan dengan variabel umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani, luas lahan, dan varietas.

2. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi rasionalisasi petani dalam penggunaan pupuk pada usahatani padi sawah di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah produktivitas, harga gabah, biaya pupuk, pendapatan usahatani, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani, lama berorganisasi (keterlibatan dalam kelompok tani), sumber-sumber informasi, ketersediaan pupuk, dan varietas.



Gambar 8. Paradigma berfikir Dinamika Tingkat Penggunaan Pupuk Bersubsidi